

KOMUNIKASI POLITIK KIAI NU DALAM KONTESTASI PILKADA PERSPEKTIF TEORI STRUKTURASI GIDDENS

UBAIDILLAH

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

ISHAQ

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

PUJIONO

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Abstrac: *This study raises the issue of political communication of kiai Nahdlatul Ulama (NU) in the contestation of regional head elections (Pilkada) and the agenda of developing civil society in Pasuruan Regency. Giddens' (1984) theory of structuration is used as a point of departure to develop key themes relevant to the data. The purpose of this research with the major theme of political communication is to understand the dialectical complexity between structure and agency that places the kiai (agent) as creative individuals and has the transformative capacity to produce and reproduce structures that on the one hand tend to limit (limiting-disable) and on the other hand, tend to be limiting. the other party enables (enabling) action, all of which is carried out by the kiai in his position as a political communicator of the religious elite for the development of civil society. This theme becomes interesting because there are many NU kiai who are directly or indirectly involved in the political map of the Pilkada that took place in this country. In fact, on one side of the organization, NU as a forum for the organization of the kiai has declared khithah as the paradigm of its struggle.*

Keywords: *Political Communication, NU Kiai, Pilkada*

Korespondensi: **Ubaidillah, Ishaq, Pujiono**
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

A. PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai pengorganisasian kegiatan kiai NU dan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan agenda pengembangan *civil society* di wilayah Kabupaten Pasuruan. Cakupan utama penelitian ini berhubungan dengan berbagai tindakan sosial yang dilakukan oleh para kiai NU dalam kedudukannya sebagai agen¹ yang secara teoritis dianggap memiliki kapasitas untuk bertindak secara kreatif dalam menghadapi struktur.² Peneliti ingin menunjukkan bahwa pengorganisasian kegiatan kiai NU dalam politik Pilkada merupakan sebuah tindakan di mana cara-cara pencapaian tujuan sebuah organisasi tidak saja ditetapkan sebagai hasil atas berbagai pilihan yang telah disediakan oleh struktur NU, tetapi juga yang diciptakan sendiri oleh individu yang dipahami sebagai agen yang memiliki kapasitas untuk bertindak kreatif. Dalam studi ini, penetapan cara-cara pencapaian tujuan tidak saja dipahami sebagai reaksi individu atas struktur, namun dapat juga timbul sebagai respon generatif dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Penekanan pada pola tindakan kreatif individu ini didasari oleh pemikiran utama Giddens tentang teori strukturasi yang menekankan pada tindakan aktif individu untuk memproduksi, mereproduksi, dan mentransformasikan struktur yang di satu pihak bersifat membatasi (*limiting*) dan di pihak lain membisakan(*enabling*).³

Dengan demikian, tindakan sosial dipahami sebagai hasil modifikasi yang kompleks yang mencerminkan pergumulan di antara tindakan (agen) dan sosialitas (struktur) dari pada semata-mata sebagai hasil determinisme struktur sebagaimana dipahami penganut aliran strukturalis Parsonian atau sebagai kontras yang

¹ Peneliti meminjam istilah agen sebagaimana yang sering diungkapkan oleh Giddens, untuk menggambarkan peran vital sosok kyai dalam organisasi NU yang mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Di samping itu kyai juga berperan banyak dalam politik. (Lihat Horikoshi 1987: 245-246, dan Dhofier 1982: 2-7).

² Giddens menggunakan dua peristilahan yang dalam banyak penutur dan kepustakaan berbahasa Indonesia diterjemahkan dengan satu kata yang sama, yaitu agen untuk *agent* dan *agency*. Dalam Penelitian ini, saya membedakan kedua istilah itu; agen untuk *agent*, dan keagenan untuk *agency*. Sementara yang disebut pertama, yakni agen, lebih merujuk pada kata benda yang menggambarkan individu; sedangkan yang disebut kedua, yakni keagenan, lebih merujuk kepada kata benda abstrak yang menggambarkan kemampuan untuk menghasilkan tindakan yang memproduksi, mereproduksi dan mentransformasikan struktur. Lihat: Ritzer dan Goodman (2004).

³ Kata "membisakan" dipakai dalam penelitian ini untuk menggantikan kata "*enabling*" yang dipakai Giddens dalam teori strukturasinya. Dalam praktek penterjemahan, khususnya dalam karya Giddens, kata "*enabling*" sering diterjemahkan dengan kata "memungkinkan". Peneliti secara sengaja memilih kata "membisakan" karena akar kata "*able*" dalam bahasa Indonesia berarti "bisa". Dari sanalah kata "membisakan" –walaupun mungkin kurang lazim ditemukan

dimengerti oleh penganut aliran interpretatif yang menempatkan penafsiran subjektif individu sebagai dasar dari sebuah tindakan sosial.⁴ Ini berarti dalam setiap tindakan sosial, agen (kiai) berkesanggupan untuk secara terus menerus berpikir tentang apa yang mereka lakukan dan mengevaluasi apakah tindakan-tindakan mereka bersesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai (*reflexive monitoring of action*).

Dengan kata lain, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa “bertindak” dalam konteks sosial sesungguhnya merupakan rangkaian tindakan yang melibatkan aturan-aturan (*rules*) dan sumber-sumber (*resources*) yang keduanya menjadi relevan hanya melalui tindakan sosial, dan yang dapat diubah atau dipelihara dalam kaitannya dengan struktur (*structures*) dan keagenan (*agency*) yang memiliki sifat dualitas. Karena itu, baik aturan-aturan maupun sumber-sumber bukanlah sesuatu yang terpisah dari tindakan agen.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada proses dialektika di antara struktur dan keagenan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, keduanya sangat saling berkaitan. Tindakan sosial (*social action*) menciptakan struktur dan hanya melalui tindakan sosial sajalah struktur diproduksi dan direproduksi yang memungkinkan struktur dapat bertahan dari satu waktu ke waktu yang lain.⁵ Pemilihan wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai tempat riset,⁶ bukan hanya karena terkenal dengan Kabupaten Santri dengan sejumlah pesantren besar, tetapi juga karena wilayah ini menjadi tempat tokoh agama yang sangat terkenal di Nusantara ini, terutama di kalangan Nahdhiyyin, yang hingga saat ini menjadi tempat kunjungan ziarah karena dianggap sebagai *auliya' Allah*, ulama itu adalah K.H. Hamid (Mbah Hamid Pasuruan).

⁴ Penganut aliran structural fungsionalis yang dasar-dasar argumentasi utamanya diletakkan oleh Emile Durkheim (1938) dan Talcott Parsons (1937, 1951) berpandangan bahwa struktur merupakan faktor yang menentukan tindakan individu. Determinasi struktur, dengan kata lain merupakan inti penjelasan dari aliran struktural fungsional yang memahami tindakan individu sebagai representasi dari “naskah” (*script*) yang terdapat dalam struktur. Sebaliknya, aliran fenomenologis yang dikembangkan oleh Schutz (1972), Berger dan Luckman (1969) berpandangan bahwa tindakan bebas individu yang bersifat voluntaristiklah yang menghasilkan struktur. Teori strukturasi Giddens yang mendasari penelitian ini menolak dualisme yang saling berseberangan itu dengan menerima secara penuh bahwa tindakan adalah hasil dari dualitas di antara struktur dan keagenan. Uraian lebih mendalam tentang argumentasi-argumentasi utama dari teori strukturasi Giddens ini akan dibahas lebih jauh di dalam kerangka teori. Sandstrom, B. *A potential risk of interactions between micronutrients* Published 1 May 2001; Medicine; British Journal of Nutrition)

⁵ Giddens, A. 1984. *The Constitution of Society-Outline Of The Theory Of Structuration*, Polity Press.

⁶ Sedangkan posisi koordinatnya 112030' - 113030' BT dan 7030' - 8030' LS. Luas wilayah seluruhnya mencapai 1.474 km² (147.401,50 Ha), dengan karakter topografi berbukit hingga pegunungan di sisi Barat dan Selatan serta merupakan dataran subur yang luas ke arah Timur.

Dalam hal politik, hampir setiap proses perpolitikan yang berlangsung di Kabupaten Pasuruan senantiasa diwarnai oleh ketegangan-ketegangan sosial dan politik. Terdapat banyak peristiwa yang dapat dicatat di antaranya adalah tragedi alas Tlogo,⁷ kasus pembunuhan dukun santet pada akhir 1997 dan awal 1998 di mana korban terornya kebanyakan kiai dan tokoh agama. Menurut pengamatan banyak pihak kasus teror dengan isu pembunuhan dukun santet tidak lebih sebagai kedok semata untuk menutupi *hidden connection* dari aksi perpolitikan praktis pemerintah pusat di tengah menguatnya eskalasi gerakan kritisisme kelompok Muslim tradisional dalam melakukan *counter culture* terhadap keamanan pemerintahan Orde Baru.⁸

Tragedi penurunan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan oleh MPR secara sinergis juga memunculkan ketegangan sosial dan politik dalam bentuk aksi massa yang secara simbolik ditujukan untuk melakukan perlawanan terhadap manuver politik para politisi di MPR. Dalam sorotan media, respon masyarakat Pasuruan yang diartikulasikan dalam aksi-aksi yang bersifat reaktif dan radikal seperti pembentukan Pasukan Berani Mati (PBM) yang dipimpin oleh Gus Mujib dan Gus Suadi. Belum lagi, kasus kekalahan kaum santri tradisional yang dimotori PKB dalam memperjuangkan perebutan pemilihan Bupati Pasuruan periode 2008-2012 dengan calonnya K.H. Jusbakir al-Jufri, dan Juga Muzammil Syafi'i, yang dimenangkan calon yang diusung partai PDIP, Dade Angga dan Eddy Paripurna.⁹

Mengapa proses perpolitikan seringkali menciptakan ketegangan sosial di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur ini? Apabila dicermati aneka ketegangan sosial sebagaimana dipaparkan di atas, tidak lebih sebagai bagian dari dinamika perpolitikan menuju pendewasaan warga dalam berpolitik. Tidak hanya di Pasuruan, ketegangan sosial akibat perpolitikan hampir dapat dipastikan terjadi di setiap daerah. Hanya saja ketegangan sosial yang mencuat di daerah ini kerap diekspose dan mendapatkan perhatian publik secara nasional. Kondisi fluktuatif demikian ini tampaknya sesuatu yang lazim mengingat warga di berbagai daerah, khususnya di Pasuruan, berada pada fase transisi politik yang ditandai olehuforia di mana-mana akibat reformasi 1998. Warga Pasuruan baru saja menghirup udara

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Insiden_Alastlogo , diakses tanggal 20 September 2022

⁸ <https://tirto.id/pembunuhan-dukun-santet-1998-sistematis-dan-terencana-dePK>, di akses tanggal 20 September 2022

⁹ <https://gusdurian.net/cerita-seorang-pasukan-berani-mati-gus-dur-asal-pasuruan/> di akses tanggal 20 September 2022

segar kebebasan politik setelah sekian lama terkungkung dalam sistem perpolitikan yang tertutup dan otoriter. Sebagaimana dimaklumi, sepanjang pemerintahan Orde Baru berkuasa selama 32 tahun lebih semua elemen masyarakat tidak dapat mengartikulasikan perpolitikannya secara bebas. Ancaman, tekanan, dan intimidasi politik sering diterima warga. Praksis, sepanjang pemerintahan Orde Baru, elemen masyarakat Pasuruan seolah tiarap di bawah tekanan represif politik pemerintah.

Seiring dengan jatuhnya rezim politik pemerintahan Orde Baru akibat reformasi 1998, warga masyarakat Kabupaten Pasuruan mulai aktif kembali terlibat dan melibatkan diri dalam proses-proses perpolitikan. Kebebasan berpolitik dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga Pasuruan untuk berkiprah dalam dunia politik agar dapat menjadi agen atau subyek politik bukan lagi obyek yang sering dikuyo-kayo. Sebagai hasilnya, pesta demokrasi periode pemilu 1999 dan 2004; tidak lagi didominasi partai politik milik pemerintah (Golkar). Hasil pemilu memantapkan PKB, representasi parpol warga masyarakat Pasuruan yang mayoritas *nahdliyin*, sebagai parpol pemenang pemilu (walau dalam Pemilu 2009 suaranya menurun drastis). Otomatis, kemenangan PKB dapat mengangkat kader-kader Nahdliyin ke pentas kekuasaan. Di samping itu, parpol-parpol yang berbasiskan agama berhasil pula meloloskan kadernya untuk duduk dalam struktur kekuasaan seperti PAN, PNU, PKS dan PPP. Wajah perpolitikan pun tampak semakin plural.

Tidak adanya parpol sebagai *single majority* dan menjadi kendaraan politik praktis pemerintah berkuasa, membuka harapan terhadap perubahan-perubahan sosial secara demokratis. Sinergi antara parpol dan elemen *civil society* pada era reformasi ini akan berimplikasi strategis dan konstruktif terhadap penataan formasi sosial Kabupaten Pasuruan yang lebih humanis, demokratis, dan religius. Namun, misi idealita ini tampaknya juga masih susah untuk diimplementasikan mengingat aktor-aktor politik di pemerintahan, dan elit-elit sosio-religius cenderung mengedepankan kepentingan kelompoknya dan banyak disibukkan oleh konflik-konflik politik dalam memperebutkan distribusi kekuasaan. Secara teoritik, pembedahan terhadap problema pengorganisasian kiai dalam politik dan agenda pengembangan *civil society* akan dikaji melalui paradigma pendekatan teori strukturasi Giddens.

Penelitian ini mengaplikasikan dan sekaligus mengintegrasikan perspektif makro yang menekankan pentingnya peran struktur dan perspektif mikro yang

memandang individu sebagai titik tolak untuk memahami sebuah tindakan sosial.¹⁰ Secara metodologis, penelitian ini dielaborasi dengan desain pendekatan kualitatif mengingat unit kajiannya adalah fenomena sosial yang dinamik. Perspektif kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini mengutamakan pada prinsip-prinsip berikut: *pertama*, informan diperlakukan sebagai individu yang berpartisipasi secara aktif dalam mengkonstruksikan realitas. *Kedua*, data dipahami sebagai hasil sebuah tindakan reflektif yang menempatkan teks dan konteks sebagai sebuah realitas yang saling berhubungan, dan yang ditemukan dalam dan melalui tindakan sosial para agen. *Ketiga*, mengutamakan proses penelitian yang memberi tempat penting bagi dialektika di antara perspektif makro-mikro, objektif subjektif, dan individual-kolektif. *Keempat*, perspektif informan adalah hal yang esensial dalam pengumpulan dan analisis data. Subjek dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data pada penelitian ini, dilakukan melalui beberapa cara seperti wawancara mendalam (*in depth interview*) yang tidak berstruktur atau wawancara yang panjang dan terbuka (*long open-ended interview*). Penelitian ini juga menggunakan sumber data dari analisis bahan tertulis (kepuustakaan dan dokumen-dokumen). Analisisnya dilakukan secara induktif dengan tahapan menghubungkan data, kategorisasi data, komparasi data, kesaling hubungan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Di samping itu penelitian ini juga akan menggunakan *reflexive methodology*.

B. PEMBAHASAN (Font Cambria 12 pt Bold)

Diskusi

Penelitian ini dijelaskan melalui kajian Komunikasi Politik yang menegaskan bahwa komunikator politik yang berada di NU memiliki peran penting dalam kontestasi Pilkada di Kabupaten Pasuruan. Mengenai makna komunikasi politik, Arifin¹¹ mengemukakan sejumlah pendapat tentang komunikasi politik. Ilmuwan komunikasi A. Muis menjelaskan bahwa istilah komunikasi politik menunjuk pada pesan sebagai objek formalnya, sehingga titik berat konsepnya terletak pada komunikasi dan bukan pada politik. Pada hakikatnya komunikasi politik mengandung informasi atau pesan tentang politik.¹² Astrid (1985) mengartikan komunikasi politik sebagai suatu komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu

¹⁰ Giddens, A. 1984. *The Constitution of Society-Outline Of The Theory Of Structuration*, Polity Press. 191

¹¹ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Balai Pustaka,, 2003), 8-9.

¹² Anwar Arifin, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Balai Pustaka,, 2003), 48.

pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.¹³

Lebih lanjut Arifin menegaskan, bahwa dengan kegiatan komunikasi politik terjadi pengaitan masyarakat sosial dengan lingkup negara sehingga komunikasi politik merupakan sarana untuk pendidikan politik/ kesadaran warga dalam hubungan kenegaraan. Muller (1973) merumuskan komunikasi politik sebagai hasil yang bersifat politik dari kelas sosial, pola bahasa, dan pola sosialisasi.¹⁴ Galnoor (1980) menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi social dimana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran. Pakar politik seperti Almond dan Powell (1966) justru menempatkan komunikasi politik sebagai suatu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen yang terdapat dalam system politik.¹⁵ Nimmo¹⁶ dengan memandang inti komunikasi sebagai proses interaksi sosial dan inti politik sebagai konflik sosial, maka komunikasi politik dirumuskan sebagai kegiatan yang bersifat politis atas dasar konsekuensi aktual dan potensial, yang menata perilaku dalam kondisi konflik¹⁷.

Berdasarkan makna komunikasi politik ini, Arifin¹⁸ menjelaskan berbagai bentuk komunikasi politik yang pada praktiknya dapat dilakukan oleh siapa yang memiliki kekuatan politik, termasuk kalangan elit kiai NU. Menurut Arifin, bentuk-bentuk komunikasi politik yang sudah lama dikenal dan dilakukan oleh para politikus atau aktivis politik antara lain retorika politik, agitasi politik, propaganda politik, publik relation politik, dan lobi politik.

Pertama, retorika politik atau pidato politik sebagai suatu seni berbicara memiliki daya persuasi politik yang sangat tinggi, dengan menggunakan bahasa

¹³ Astrid S, Susanto. *Komunikasi Sosial di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta, 1985, hal 34

¹⁴ Bachruddin Ali Akhmad, *Momunikasi Politik*, Yogyakarta:Aswaja Presindo, 1999, 67

¹⁵ Almond, Gabrieldan B Gingham Powel, *Comperatif Politics; A Development Approach*, Boston:Little Brown, 1966. 78

¹⁶ Dan D Nimmo, *Komunikasi Politik ; Khalayak dan Efek*. Bandung :Remaja Rosdakarya, 2006..

¹⁷ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Balai Pustaka,, 2003),

¹⁸ Kun Wazis, *Strategi Politik Meraih Dukungan Massa Pondok Pesantren* (Jember: Jurnal Fenomena Vol. 14, No. 1, 2016), 164-165, diakses melalui <https://adoc.pub/strategi-politik-meraih-dukkungan-massa-pondok-pesantren.html>

lisan yang indah, mulai dari irama, mimik, dan intonasi suara. Seorang orator selain harus memiliki pengetahuan kejiwaan manusia, ia juga harus memiliki kesadaran mendalam tentang kebenaran, terutama aspek kebenaran suatu permasalahan yang dibicarakan. *Kedua*, agitasi politik adalah suatu upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan atau tulisan, dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khalayak. Agitasi dimulai dengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat dan menggerakkan khalayak untuk menentang kenyataan hidup yang dialami selama ini yang penuh ketidakpastian dan penuh penderitaan, dengan tujuan menimbulkan kegelisahan di kalangan massa. Kemudian rakyat digerakkan untuk mendukung gagasan baru dan ideologi baru dengan menciptakan keadaan yang baru.

Ketiga, propaganda politik merupakan suatu kampanye politik yang dengan sengaja mengajak dan membimbing untuk mempengaruhi atau membujuk orang guna menerima suatu pandangan, sentimen, atau nilai. Propaganda politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, partai politik, dan kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan politik (strategis atau taktis) dengan pesan-pesan yang khas yang lebih berjangka pendek. *Keempat*, public relation politik merupakan bentuk kegiatan dalam melakukan hubungan dengan masyarakat, secara jujur (tidak berbohong), terbuka, rasional (tidak emosional), dan timbal balik (dua arah). Dengan demikian, dapat terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, yang dimulai dengan menciptakan rasa memiliki (*sense of be-longing*) bagi masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat memperoleh citra yang baik terhadap pemerintah sehingga memberikan dukungan yang positif.¹⁹

Kelima, kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat. Pada umumnya, kampanye politik diatur dengan peraturan tersendiri, yaitu waktu, tata caranya, pengawasan, dan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran oleh penyelenggara pemilu. Strategi kampanye ditujukan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam

¹⁹ Arifin, Anwar. 2006. *Ilmu Komunikasi : Sebuah Pengantar Ringkas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

pemilu, agar dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah kepada perubahan masyarakat.

Keenam, lobi politik merupakan kegiatan politik yang sangat penting, meskipun pembicaraan politik bersifat dialog, tatap muka atau antarpersona (interpersonal communication). Kegiatan tersebut bersifat sangat informal, namun urgen karena hasil lobi itu kemudian dapat diperkuat melalui pembicaraan formal dalam rapat politik, persidangan-persidangan dan fo-rum musyawarah, baik didalam partai politik maupun di parlemen, dan di lembaga-lembaga politik lainnya. Lobi dilakukan dengan cara mem-pengaruhi pihak-pihak yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk turut menentukan kehendak politik serta menjalankan keputusan yang diambil.

Ketujuh, pola tindakan adalah peristiwa politik yang terjadi dari waktu ke waktu yang membentuk pola. Lobi politik, retorika politik, dan kampanye politik dapat juga disebut tindakan politik yang dapat mencakup tindak atau perilaku yang memiliki kepentingan politik, yaitu tindakan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan konflik. Misalnya, penggunaan bendera partai, jaket partai, pernyataan pimpinan partai, dan sikap diam seorang tokoh politik.²⁰

Pengorganisasian Kegiatan Sebagai Dualitas Struktur Dan Keagenan

Dipahami dalam perspektif Giddens (1984), kreativitas yang menjadi dasar dari kemampuan agen memodifikasi struktur pada dasarnya dikerangkai oleh tiga properti institusional (*institutional properties*): (1) skema interpretif (*interpretive schemes*) yang memberi kerangka dasar bagi interaksi yang bermakna; (2) sumber-sumber (*resources*) yang dialokasikan dan menjadi basis bagi kekuasaan individual (*individual power*) untuk bertindak; dan (3) aturan-aturan (*rules*) yang merupakan norma dan konvensi yang membatasi tindakan individu yang muncul dari pos-pos interaksi yang berulang.²¹ Interaksi di antara agen dan ketiga modalitas inilah yang menjadi inti dari proses strukturasi.²²

²⁰ Lihat juga Retna Setya Rahajoe, *Bentuk Komunikasi Politik Untuk Membangun Perilaku Politik Masyarakat Lokal Guna menciptakan Pemilukada Yang Aman*, JKMP, ISSN,2338-445X, Vol 1 No, 1, Maret 2013

²¹ Pozzebon and Pinsonneault, *Structuration Theory In The Is Field: An Assessment Of Research Strategies* Global Co-Operation in the New Millennium The 9th European Conference on Information Systems Bled, Slovenia, June 27-29, 2002: 206

²² Stein, 1996)

Sumbangan terpenting Giddens (1984) dalam memahami organisasi sebagai sebuah intitusi sosial terletak pada argumentasinya yang memandang bahwa tindakan manusia merupakan kondisi dan sekaligus dikondisikan secara terus menerus oleh properti institusional dalam sebuah konteks sosial.²³ Karena itu, sebagai sebuah kerangka dialektika, sistem sosial dipahami dalam jaringan aksi yang saling mempengaruhi (*interdependent networks of actions*), dalam mana perubahan yang terjadi pada satu hal akan menghasilkan perubahan dalam hal yang lain.²⁴ Dengan kata lain, dualitas struktur menghasilkan satu keadaan, di mana aturan-aturan dan sumber-sumber yang dilibatkan dalam produksi dan reproduksi tindakan sosial pada saat yang sama juga menjadi sarana dari sistem reproduksi.²⁵

Dari perspektif teori strukturasi, perubahan organisasional di tingkat kebijakan tentang penentuan prioritas merupakan hasil dari tindakan-tindakan individu yang berinteraksi dengan struktur yang meliputi aturan-aturan perundang-undangan, strategi organisasi, mekanisme dan protokol resmi. Di samping membatasi, struktur juga memberi peluang untuk bertindak. Walaupun demikian, kedua-duanya tidak dalam posisi menentukan sepenuhnya atas tindakan individu. Sementara itu, harus dicatat bahwa pilihan-pilihan yang tersedia tidaklah sepenuhnya bebas dari struktur. Dengan demikian, interaksi individu dan struktur dapat mengambil bentuk-bentuk yang beragam: bergerak dari mempengaruhi (*influencing*) dan membentuk (*shaping*) ke arah interaksi yang bersifat memelihara (*maintaining*), memperkuat (*reinforcing*), mengubah (*changing*), bahkan menghancurkan (*destroying*). Hubungan di antara individu dan struktur yang mencerminkan dualitas struktur inilah yang menghasilkan argumentasi umum, bahwa perubahan organisasional yang berasal dari sebuah situasi yang mirip adalah tidak sepenuhnya dapat diprediksi.²⁶

Paradigma Politik Kiai

Kajian-kajian tentang kiai memperlihatkan kelebihan luar biasa yang dimiliki sosok kiai. Lazimnya, kiai merupakan gelar yang disandang oleh seseorang yang mempunyai kelebihan di bidang ilmu-ilmu hukum (Fiqh, Tauhid dan Tasawwuf)

²³ Giddens, A. 1984. *The Constitution of Society-Outline Of The Theory Of Structuration*, Polity Press. 191

²⁴ Holmer-Nadesan, 1990

²⁵ Giddens, A. 1984. *The Constitution of Society-Outline Of The Theory Of Structuration*, Polity Press, 19

²⁶ Pozzebon and Pinsonneault, *Challenges in Conducting Empirical Work Using Structuration Theory: Learning from IT. Research*. 2001: 206-207).

dalam agama Islam. Mereka mempunyai peran yang esensial dalam masyarakat. Di samping itu, keberadaan kiai dalam masyarakat mendominasi pengaruh kultural.

Setidaknya ada tiga faktor penting mengapa keberadaan kiai di masyarakat terasa penting. *Pertama*, tingginya derajat mobilitas kiai dalam membangun jaringan dengan komunitas di luarnya, baik sesama kiai ataupun pertemuan dengan jaringan-jaringan tertentu, sehingga memungkinkan mereka memperoleh informasi baru yang dimiliki para santri dan masyarakat sekitarnya. *Kedua*, posisi sentral dan ketokohan kiai di desa dan di pesantrennya, menjadikan mereka sebagai sumber rujukan bagi orang dari luar desa, di mana orang-orang yang datang ke desa tak bisa mengabaikan eksistensi dan peran kiai. *Ketiga*, sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari posisinya, kiai biasanya memiliki kelebihan yang bersifat material dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, termasuk memiliki akses informasi yang lebih baik. Dalam optik akademik, istilah kiai untuk pertama kalinya diperkenalkan Geertz pada tahun 1960 dalam kerangka studi antropologi untuk mewakili sosok ahli agama.²⁷ Sedangkan Horikoshi²⁸ secara konsisten membedakan penggunaan istilah kiai dari ulama karena fungsi formal yang diperankannya. Ulama lebih memerankan fungsi-fungsi administratif, sedangkan kiai cenderung bermain pada tataran kultural.

Menurut Miftah Faridl, fenomena perbedaan perilaku sosial politik di kalangan kiai, dalam banyak hal, dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya dua faktor. *Pertama*, faktor posisi sosial kiai yang menurut studi-studi terdahulu memperlihatkan adanya suatu kekuatan penggerak perubahan masyarakat. Studi yang dilakukan Horikoshi, misalnya, menunjukkan kekuatan kiai sebagai sumber perubahan sosial, bukan raja pada masyarakat pesantren tapi juga pada masyarakat di sekitarnya.²⁹ Sementara Geertz menunjukkan kiai sebagai makelar budaya (*cultural brokers*) dan menyatakan bahwa pengaruh kiai terletak pada pelaksanaan fungsi makelar ini.³⁰ Meskipun secara politik kiai dikategorikan sebagai sosok yang tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan profesional, tetapi secara sosial

²⁷ Clifford Geertz, *The Javanese, Kiyahi the Change Riles of Cultural Broker, Comparative Studies in Social and Antroplogy*, (tt: tp 1960), 250-256

²⁸ Hiroko Horikosi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987), 242

²⁹ Hiroko Horikosi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987), 240

³⁰ Clifford Geertz, *The Javanese, Kiyahi the Change Riles of Cultural Broker, Comparative Studies in Social and Antroplogy*, (tt: tp 1960), 250-256

terbukti mampu menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin digunakan.

Kedua, faktor kekuatan personal yang diwarnai oleh pemikiran teologis yang menjadi dasar perilaku yang diperankannya. Sebagai sosok yang diidentifikasi memiliki kekuatan kharismatik di tengah-tengah masyarakatnya, kiai dipandang memiliki kemampuan "luar biasa" untuk menggerakkan masyarakat khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan politik. Dia bukan politisi, tapi kalkulasi politiknya yang dianggap "fatwa" politik yang terakhir untuk diikuti.³¹ Kasus Gus Dur yang tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden RI. ketika itu, seperti diketahui banyak kalangan, sebetulnya karena "nasihat-nasihat" kiai yang mendorong untuk mengambil keputusan seperti itu. Hubungan kausalitas antara kedua faktor inilah yang kemudian dielaborasi secara kritis dalam penelitian ini. Penelitian perselingkuhan kiai dan kekuasaan yang dilakukan Endang Turmudi sangat aktual untuk memotret peran politik kiai di era reformasi ini. Buku yang meneropong pasang surut perpolitikan kiai ini dapat menjadi bahan rujukan untuk melihat peran kiai dalam pemilu mendatang. Kendati hanya meneliti peran kiai di Jombang, Jawa Timur, namun diyakini hasilnya adalah representasi dari peran kiai Nahdlatul Ulama di daerah-daerah lain.³²

Peran kiai dalam kancah politik nasional sempat menyurut sejak NU mengeluarkan kebijakan "kembali ke *khittah*". Namun, sebagian kalangan menyebut, penyebab kiai mundur dari ruang politik sebenarnya akibat para kiai tergusur dari PPP, saat partai itu dipimpin J. Naro. Namun, seiring reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto, peran politik kiai kembali terbuka. Ini bisa ditandai dengan munculnya PKB yang disokong penuh kiai NU. Mencoloknya perolehan suara PKB dalam Pemilu 2004 misalnya dapat juga menandai kebangkitan kiai NU. Bahkan suara PKB secara nasional 60 persennya dipasok dari Jawa Timur yang menjadi basis kaum Nahdhiyin. Dalam pemilu 2009 suara PKB mengalami penurunan akibat konflik elit agama di Pucuk Pimpinan PKB, dan dalam pemilu 2014 suara PKB naik lagi walaupun tidak bisa mengulang kesuksesan pada Pemilu 2004.

³¹ Miftah Faridl, *Peran Sosial Politik Kiai Di Indonesia* (Jurnal al Isthinbath, Volume XIX No. 2 April - Juni 2003), 135 - 151

³² Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2004)

Dari perspektif pemerintah, kekuasaan kiai cukup kuat untuk mempengaruhi tindakan sosial-politik masyarakat. Hal ini karena para kiai adalah pemegang legitimasi keagamaan. Legitimasi kiai ini oleh pemerintah atau para elite politik dapat digunakan untuk melegalkan tindakan-tindakan duniawi mereka.³³ Otoritas kiai tak selamanya langgeng. Tak sedikit kiai yang otoritasnya hancur akibat berselingkuh dengan penguasa atau memang mabuk kekuasaan. Pada saat umat sudah tak percaya lagi dengan otoritas kiai, saat itu juga umat secara perlahan akan meninggalkannya. Kasus ini banyak terjadi pada zaman Orde Baru. Ketika kiai berbondong-bondong masuk Golkar, umat tidak otomatis ikut, mereka bahkan malah menjauhi sang kiai. Endang Turmudi berpendapat, perselingkuhan kiai dengan penguasa tak akan menghilangkan peran dan otoritas kiai secara keseluruhan. Kiai sebagai penjaga moral dan nilai-nilai masih relevan dan berjangka panjang. Sebab pada dasarnya kiai dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu kiai pesantren, kiai tarekat, dan kiai yang terlibat dalam politik. Jenis kiai yang terakhir inilah sebenarnya yang rawan berselingkuh dengan penguasa dan mabuk kekuasaan.³⁴

Deskripsi di atas menggambarkan bahwa kiai sebenarnya tidak akan pernah terlepas dari politik. Begitu juga dengan hasil penelitian penulis ini. NU yang menjadi sentral dari organisasi para kiai menjadi media penelitian sejauh mana kiai berpersepsi tentang keterlibatan kiai dengan politik kekuasaan. Pandangan tentang hubungan NU dan politik sesungguhnya bagai pinang dibelah dua, keduanya tidak dapat dipisahkan. Mayoritas kiai menyatakan bahwa NU dan politik adalah dua entitas yang tidak bersifat diametral, keduanya berhubungan satu sama lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh K.H. Su'ud Ibrahim (Mantan Ketua Tanfidh PKB), bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari kehidupan politik karena manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*). Begitu juga NU, sebagai organisasi yang memiliki massa besar, NU tidak bisa menghindari dari kehidupan politik. Hanya saja, politik NU haruslah politik kebangsaan bukan politik praktis yang sibuk memperebutkan kekuasaan. NU sebagai *jam'iyah ijtima'iyah diniyyah* harus menjadi *rahmatan lil alamin*, sekaligus kontrol bagi kehidupan politik.³⁵

Senada dengan K.H. Su'ud, K.H. Ahmad Subadar mengungkapkan jika warga NU bersikap apolitik maka Indonesia bisa hancur. Kiai Subadar mencontohkan pada

³³ Wawancara dengan K.H. Abdurrahman Syukur, 24 Maret 2015

³⁴ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2004), 264

³⁵ Wawancara, tanggal 25 Maret 2015.

pemilu 2004 silam, pemilu 2009 dan pemilu 2014 kemarin, jika warga NU tidak ikut berpartisipasi maka tatanan demokrasi yang diinginkan bangsa Indonesia tidak akan terwujud. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Su'ud, Kiai Subadar juga menggarisbawahi bahwa yang dimaksud politik dalam konteks hubungannya dengan NU bukan politik kekuasaan melainkan politik partisipatoris, yaitu politik di mana NU juga berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara (*civil Society*).³⁶

Pendapat-pendapat di atas hampir sama dengan yang dipaparkan oleh semua kiai, peneliti tidak mendapatkan perbedaan pandangan dari para kiai yang menjadi informan. Peneliti mendapatkan pengembangan informasi di atas dari Gus Mujib (Pengasuh Pondok Pesantren al-Yasini Areng-Areng), beliau secara gamblang memberikan argumentasi mengapa NU tidak dapat dipisahkan dengan hiruk pikuk politik, beliau mengatakan:

Saya kira ini karena NU sendiri kan lahir pada saat situasi politik sedang panas. Ketika perang dunia I selesai tahun 1918, di dalam negeri pergerakan kemerdekaan mulai tumbuh. Dan ini memang sudah dimulai sejak awal abad XX yang kita sebut sebagai awal kebangkitan nasional. Tahun 1905 SDI (Scrikat Dagang Islam) lahir; tahun 1908 Budi Oetomo lahir; tahun 1912 Muhammadiyah lahir, 1914 ISD yang dipelopori oleh orang-orang Belanda yang berpaham kiri juga muncul, bahkan akhirnya organisasi ini terseret ke dalam PKI pada tahun 1920. Kemudian tahun 1924 PKI memberontak. Pemberontakan yang tidak matang itu, akhirnya merugikan proses perjuangan kemerdekaan. Nah, tahun 1926 NU lahir. Antara tahun 1924-1926 itu, di samping orang-orang pergerakan, banyak kiai dan santri yang ditangkap Belanda dengan tuduhan komunis. Ada yang mencari-cari, apakah kelahiran NU tersebut tidak ada hubungannya dengan upaya menyelamatkan kiai-kiai yang baru ditangkap Belanda. Saya sendiri belum bisa memastikan, ini kan urusannya ahli sejarah. Terus pada tahun 1927 Bung Karno mendirikan PNI. Tahun 1928 ada Kongres pemuda, yang menurut saya, ini pantas disebut sebagai hari kelahiran bangsa Indonesia. Tahun 1931 PNI-nya Bung Karno dibubarkan, kemudian dibentuk Partindo (Partai Indonesia Raya) yang dipimpin oleh Sartono. Sebagian anggota PNI yang tidak setuju dengan pembentukan Partindo, kemudian meneruskan nama PNI tetapi dengan singkatan lain, Pendidikan Nasional Indonesia

³⁶ Wawancara, tanggal 04 Mei 2015

atau yang disebut dengan PNI Baru. Tahun 1936 Boedi Oetomo bergabung dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PRI). Dan seterusnya...." ³⁷

Lebih lanjut Gus Mujib menjelaskan, bahwa sejak kelahirannya, NU selalu ditarik-tarik ke dalam siklus politik praktis, sehingga meskipun bukan organisasi politik, NU termasuk bagian dari makhluk politik yang tidak bisa lepas dari politik. Jika Gus Mujib melihat keterlibatan NU dalam politik Pilkada disebabkan NU mempunyai massa besar, tidak demikian dengan Kiai Sholeh Bahruddin, yang mengartikan bahwa NU menjadikan politik hanya sebagai instrumen untuk mencapai tujuan NU. Sebagaimana pendidikan, dakwah, ekonomi, dan lainnya, politik juga merupakan sarana mengejawantahkan visi dan misi organisasi. Politik dalam konteks NU bukan upaya mendapatkan kekuasaan atau hanya demi kepentingan yang oportunistik. Mengenai hal ini, Kiai Sholeh menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

NU tidak main politik praktis, namun kalau NU memperjuangkan agama ini menggunakan instrumen politik, ini tidak salah? Artinya NU harus tidak anti politik. Apakah politik kebangsaan, kerakyatan atau juga politik kekuasaan, asalkan kekuasaan yang ada dapat dijadikan instrumen bukan tujuan.³⁸

Dari beberapa pandangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *pertama*, NU tetap tidak bisa lepas dari politik, akan tetapi politik dalam perspektif NU adalah politik kebangsaan dan partisipatoris. *Kedua*, dengan massa yang besar NU tidak mudah memisahkannya dengan politik, termasuk politik praktis. *Ketiga*, NU menjadikan politik sebagai instrumen dalam mencapai tujuan-tujuan organisasinya. Di sinilah para kiai sebenarnya sering melakukan tindakan-tindakan akrobatik, berlawanan dengan keputusan struktural organisasi.

Akan tetapi menurut penulis, seperti yang dikatakan K.H. Sholeh, bahwa yang harus menjadi perhatian utama dari politik kiai adalah *pertama*, disadari atau tidak, kiai-kiai NU telah begitu jauh dalam hal keterlibatannya mendukung capres, Pilgub, Pilbub. Memang, keterlibatan kiai dalam momen-momen politik bukanlah hal baru. Sejak masa-masa awal kemerdekaan komunitas kiai senantiasa terlibat dalam berbagai peristiwa politik. Namun, keterlibatan tersebut tidak bersifat monopolistik. Namun, hal yang paling mengerikan adalah kalau terjadi "perselingkuhan" antara

³⁷ Wawancara, tanggal 20 April 2015.

³⁸ Wawancara, tanggal 9 Mei 2015.

pemegang kekuasaan dengan kiai. *Kedua*, komunitas kiai sebagai modal sosial NU yang tidak dimiliki komunitas lain, seharusnya ditempatkan (atau menempatkan diri) sebagai subyek, bukan sebagai obyek. Mereka dibutuhkan hanya pada saat-saat politisi membutuhkan dukungan. Setelah itu, kiai kembali dipandang sebagai komunitas tradisional tiada guna. *Ketiga*, kiai NU harus sadar betul bahwa apa pun sikap politik mereka akan membawa dampak terhadap masyarakat NU yang masih memandang kiai sebagai panutan, bukan hanya dalam urusan keagamaan tapi juga dalam hal sikap politik. Oleh karena itu, kearifan kiai NU dalam membentuk sikap politik warganya juga harus diikuti oleh kesadaran akan dampak sikap tersebut.³⁹

Komunikasi Politik PKB dan NU

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus diakui sebagai refleksi dari politik kiai. Para deklarator PKB merupakan para kiai yang memiliki otoritas tertinggi di jagad NU. Akan tetapi tidak semua kiai satu komitmen bahwa PKB adalah partainya warga NU yang berakibat kepada wajibnya warga NU menyalurkan aspirasinya ke PKB.

Setidaknya ada tiga polarisasi pendapat kiai tentang hubungan NU dengan PKB. *Pertama*, anggapan bahwa NU harus mendukung dan mengharuskan warganya untuk mencoblos PKB. *Kedua*, bahwa NU secara institusi tidak bisa mengharuskan NU untuk mendukung PKB, akan tetapi hanya cukup menyerukan atau menghimbau kepada warga NU dalam mendukung PKB. *Ketiga*, bahwa secara struktural tidak ada hubungan sama sekali dengan PKB.

Kelompok pertama ini diasumsikan oleh Kiai Muftaba, beliau sangat yakin akan kebenaran pendapatnya. Menurut beliau, PKB merupakan anak tunggal NU dan dilahirkan oleh NU, jadi sangat wajar jika warga NU diharuskan untuk memilih PKB sebagai tempat penyaluran aspirasi politiknya. Kiai Muftaba mengatakan:

PKB itu dilahirkan NU, jadi seperti anak dengan ibu yang tidak bisa dipisahkan. Dan lagi NU dan PKB itu diibaratkan sebagai suami istri. Dalam rumah tangga suami istri harus bekerja sama, jangan sampai bermusuhan, kalau bermusuhan nanti bisa cerai. Jadi saya menyalahkan orang NU yang tidak memilih PKB. PPP bukan miliknya NU, PPP itu miliknya orang Masyumi, apalagi Golkar. Iya kalau pada masa Soeharto NU tidak memiliki partai sendiri.⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan K.H. Sholeh, tanggal 20 April 2015

⁴⁰ Wawancara, tanggal 15 April 2015.

Dari pendapat Kiai Mujtaba ini, tampaknya Kiai Mujtaba mengecam warga NU yang tidak memilih PKB sebagai tempat penyaluran aspirasi politiknya. Pengecaman ini bukan tidak beralasan, sebab menurut beliau PKB merupakan kekuatan politik NU, sehingga harus didukung penuh oleh warganya. Lebih lanjut Kiai Mujtaba mengatakan:

PKB itu kekuatan NU, urusan politik ya berikan kepada PKB, tidak boleh orang NU yang menjadi pengurus NU mencalonkan Bupati atau Presiden. Jadi kalau mau mencalonkan, ya jadi pengurus PKB saja. Dulu seperti Pak Hasyim, sesungguhnya Pak Hasyim itu tidak boleh mencalonkan menjadi Presiden kalau tidak dari PKB, kemudian bagaimana jika kalah kembali lagi menjadi ketua NU, Muktamar kemarin itu penuh rekayasa oleh orang NU sendiri (Wawancara, tanggal 15 April 2015).

Dari pemaparan Kiai Mujtaba di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Kiai Mujtaba menghendaki ada pembagian yang jelas antara kerja NU dengan PKB, sehingga tidak terjadi saling rebutan lahan. Saat penulis melakukan *cross check* ke orang dekat beliau, Yusrin Ilyas, ternyata Kiai Mujtaba amat getol mengkampanyekan PKB kapan pun dan di manapun; di pengajian, acara peletakan batu pertama Masjid, istighosah maupun pada acara lainnya. Masih menurut Yusrin, Kiai Mujtaba selalu marah pada santri beliau yang tidak ikut berjuang membela PKB. dengan Yusrin Ilyas,⁴¹

Pendapat kedua berpandangan bahwa hubungan antara NU dengan PKB hanya bersifat historis dan emosional. Dengan demikian warga NU diharapkan memilih partai yang mempunyai hubungan secara historis dengan NU. Pendapat ini diutarakan oleh Kiai Subadar Pasuruan. Menurut beliau, PKB dalam kelahirannya dibidani secara langsung oleh NU, jadi sangat wajar jika warga NU secara emosional merasa ada ikatan batin dengan PKB. Ketika Orde Reformasi dibuka, mayoritas *nahdliyin* menghendaki agar PBNU membuat partai sendiri sebagai wadah aspirasi warga NU, sehingga saat itu PBNU mengintruksikan kepada lima Kiai untuk menyiapkan kelahiran partai NU tersebut.⁴² Akan tetapi dengan alasan bahwa PKB sudah tidak bisa memperjuangkan kemaslahatan umat NU, PKB sudah rusak secara etika politik. Maka dengan berpegang pada kemaslahatan ummat ia menjadi pelopor berdirinya PKNU.

⁴¹ Wawancara tanggal 25 Mei 2015.

⁴² Wawancara, tanggal 18 Mei 2015 sebelum beliau aktif di PKNU

Kiai Mujib juga berpendapat demikian, ia menghendaki PKB menjadi partai yang independen, dalam arti tidak memiliki hubungan lagi dengan NU. Tetapi ketika dikonfirmasi kepada teman dekatnya Gus Ali Zen, ternyata Kiai Mujib memiliki kecenderungan persepsi yang lama seperti Kiai Subadar. Kiai Ali Zen menyatakan, bahwa Kiai Mujib sering berbicara tentang hubungan NU dengan PKB. Kiai Mujib menghendaki PKB menjadi partai besar yang tidak selalu bergantung kepada NU, tak lupa Kiai Mujib berharap PKB mampu mengemban amanat warga NU yang telah memilih PKB sebagai partai pilihan mereka.⁴³

Dengan melihat perjalanan politik PKB yang dinilai gagal oleh Gus Mujib, ia pun dengan berpedoman pada prinsip dasar politik *ahlussunnah wal jama'ah* yang selalu mementingkan kepentingan umat dari pada kepentingan individu, maka Gus Mujib pun akhirnya bergabung dengan PKNU sebagai wadah untuk menyalurkan tujuan politiknya (Wawancara, tanggal 20 April 2015).

Senada dengan Kiai Mujib, K.H. Khoiron Syakur juga berpandangan jika PKB terus-menerus *ngendon* di NU, maka PKB tidak akan pernah menjadi partai besar. PKB diidealkan menjadi partai yang tidak hanya milik warga NU saja, namun milik bangsa Indonesia, sehingga dalam AD/ART, partai ini pun berasaskan Pancasila, bukan berasaskan Islam (Wawancara, tanggal 01 Juni 2015).

Pendapat ketiga menyatakan, bahwa NU dengan PKB secara struktur tidak ada hubungan apa pun. Secara historis berdirinya PKB memang difasilitasi oleh NU, sebagaimana PPP yang berdirinya juga tidak lepas dari campur tangan NU. Dengan demikian tidaklah adil jika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saja yang disebut memiliki hubungan historis dengan NU. Padahal secara emosional warga NU juga terikat dengan beberapa partai yang berdiri pada waktu Orde Baru seperti, Golkar dan PDI-P, maupun partai yang lahir di Era Reformasi seperti PKU, PNU dan Partai SUNI dan juga PKNU. Jadi sebenarnya partai yang memiliki ikatan emosional dengan NU tidak hanya PKB saja, sebab sejak dulu NU memang tidak ke mana-mana, tapi berada di mana-mana. Pendapat ini diutarakan oleh Kiai Sholeh Bahruddin yang mengatakan sebagai berikut:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ya urusannya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mereka punya rumah tangga sendiri, sedangkan NU ya urusannya NU sendiri. NU kan sama dengan tentara, semua orangnya disebar ke mana-mana. Saya kira kita harus bisa berpikir lebih dewasa. Menurut saya, kami ingin mengajak dewasa

⁴³ Wawancara, tanggal 26 Mei 2015

semua warga NU marilah kita berkiprah *min abwaabin mutafarriqah*, dari pintu yang bermacam-macam. Mestinya begitulah di antara kita agar tidak saling *jealous*. Sebenarnya kalau Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berbasis NU itu bisa bermain politik cantik, proporsional dan profesional itu akan bagus, tidak akan muncul PKNU dan lainnya. Ingat NU itu rumah kita, dan partai politik itu kendaraan kita. Jangan di samakan.⁴⁴

Namun demikian K.H. Sholeh menolak jika ada pendapat yang menyatakan bahwa NU tidak ada hubungan sama sekali dengan PKB. Menurutnya, sudah ada agenda rutin silaturahmi antara NU dengan PKB. Rapat tersebut diadakan, di samping agar terjadi hubungan baik antara keduanya juga terjadi saling tukar informasi.

Dari ketiga pandangan tersebut, nyatalah bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara para kiai mengenai hal ikhwal hubungan NU dengan PKB. Sebenarnya pendapat-pendapat itu menampilkan karakteristik-karakteristik dari masing-masing kiai NU. Perbedaan persepsi ini, sering diikuti oleh tindakan-tindakan praktis para kiai sesuai dengan logika berfikir mereka dalam bertindak, dengan tujuan yang sama yaitu kemashlahatan ummat.

Pola Hubungan Ideal antara NU dengan Politik

Idealisme terkadang dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak pernah ada, ia hanya ada dalam dunia mimpi yang maya dan abstrak. Sesuatu yang diinginkan tidaklah mudah untuk dicapai, melainkan harus melalui tahapan sulit, dan di situlah letak rintangan saat menuju pada pencapaian cita-cita yang diidealkan. Namun, ketika terbentur realitas, ada kalanya sebuah idealisme hilang dan menjadi sesuatu yang utopis.

Demikian juga dengan NU, sejak organisasi ini berdiri, selalu terjadi dialektika sejarah dan proses mencoba (*trial and error*) dalam relasinya dengan kekuasaan. Para pendiri NU selalu mengalami pancaroba, begitu pula dengan generasi selanjutnya. Pada awal mula didirikan, NU menjadi organisasi keagamaan yang konsisten dengan garis perjuangannya sebagai organisasi non-politik, meskipun dalam proses dialektika sejarahnya NU kemudian bermetamorfosa menjadi sebuah partai politik yang pada akhirnya kembali ke tujuan semula, yaitu sebagai *Jam'iyah Ijtima'iyah Diniyyah*. Dari situlah format ideal NU *Vis a Vis* politik kekuasaan acapkali menjadi perdebatan, baik di internal NU sendiri maupun dari

⁴⁴ Wawancara, tanggal 3 Juni 2015.

pihak eksternal yang acapkali menempatkan diri sebagai pengamat dan pemerhati NU.

Kiai Sholeh mengatakan sebagai berikut:

Sebenarnya menurut saya, sejak 1984 sampai sekarang kan tidak ada perubahan, hanya tingkat intensitas dan frekuensinya saja yang berbeda, khususnya ketika bersinggungan dengan politik yang kalau boleh saya katakan seperti gelombang. Ketika tahun 1984 kita benar-benar *khittah* murni, yang membawa konsentrasi kita kepada dakwah, pendidikan, dan sosial. Ketika itu kita lumayan dapat berjalan optimal karena peran-peran politik NU dan warganya ketika Orde Baru tidak dapat peluang dan betapa peran politik NU demikian termarginalisasi. Ketika pak Harto lengser dan ada peluang bahkan NU mencoba memposisikan politik sebagai bagian dari instrumen untuk memperjuangkan agama, itu sebenarnya juga merupakan bentuk eksperimen yang tidak serta merta salah. Hanya, kadang tidak merasa hubungan antara agama dan politik mengakibatkan agama dijadikan hanya sebagai instrumen sedangkan politik sebagai tujuan.⁴⁵

Pendapat Kiai Sholeh di atas menggambarkan secara periodik bagaimana pola hubungan NU dengan politik. Banyak yang mengakui jika NU sudah bersinggungan dengan kepentingan politik, maka NU akan merasa sulit dalam mencapai tujuan awalnya. Oleh karena itu tugas NU adalah sebagai wadah pemberdayaan umat, meskipun di satu sisi NU haruslah ditopang dengan politik sebagai pemberi akses dalam pengambilan kebijakan (*policy*). Dalam posisi seperti ini, hubungan NU dengan politik haruslah demi kemaslahatan warga NU.

Kiai Syaifullah Damanhuri menilai bahwa pola hubungan ideal NU dengan politik adalah bahwa NU tidak berpihak pada salah satu partai. Dengan kata lain, NU haruslah menjaga jarak dengan semua partai politik, tak terkecuali dengan partai yang memiliki hubungan historis dengannya. Adapun kiprah NU adalah sebagai gerakan moral yang mampu mengontrol kehidupan politik, bukan ikut *cawe-cawe* mcngurus partai politik.⁴⁶

Sedangkan Kiai Mujib berharap NU ke depan selalu dapat mengemban misi ummat. Menyangkut format hubungan NU dengan politik, NU berkewajiban menjaga moral dari politisi-politisi NU, warga NU yang aktif di parpol jangan menggunakan institusi NU sebagai kendaraan politik, sehingga NU tidak terus terjebak dalam permainan elit-elitnya. Sebagai gerakan moral, kiprah NU tidak harus berada dalam

⁴⁵ Wawancara, tanggal 03 Juni 2015.

⁴⁶ Wawancara, tanggal 27 Juni 2015

partai politik, NU bisa memberikan sumbangsih dalam membangun bangsa dan negara juga *civil society*.⁴⁷

Konstruk Politik Kiai: Pemaknaan Khittah NU 1926

Khittah 1926 NU akhir-akhir ini banyak diperbincangkan. Khittah merupakan garis dan landasan perjuangan NU. Sejak ditetapkannya keputusan kembali ke khittah 1926 pada Muktamar NU ke-28 di Situbondo pada 1984, pemaknaan atas khittah selalu menjadi polemik. Bahkan dalam perkembangan sejarah NU, terjadi pemetaan mengenai makna khittah sendiri, sehingga secara khusus penulis meneliti pula tentang pemaknaan khittah 1926 dalam perspektif para kiai yang hasilnya beragam dan fantastis. Banyak kiai memaknai khittah sesuai dengan kepentingan politiknya, tapi tidak sedikit pula yang konsisten dengan pemaknaan khittah 1926 sesuai keputusan Muktamar 1984.

K.H. Sholeh Bahruddin melihat kalau khittah cenderung hanya ditafsirkan bahwa NU tidak lagi terikat dengan parpol mana pun. Pada saat itu, NU memutuskan keluar dari PPP sehingga banyak beranggapan bahwa khittah NU adalah ketika NU keluar partai tersebut, padahal tidak demikian. Kiai Sholeh mengatakan:

"Khittah itu tidak sekedar dimaknai dengan keluarnya NU dari PPP atau dari parpol tertentu. Yang disebut khittah itu muatannya jauh lebih dalam, khittah itu menerangkan NU sepenuhnya, seutuhnya mulai dari sejarahnya, motivasi didirikannya, dasar keagamaannya, tentang kemasyarakatannya secara komplit. Tetapi pada umumnya bahwa yang dinamakan khittah itu adalah NU tidak terikat dengan partai. Kata-kata tidak terikat itu kemudian ditafsiri macam-macam dan nggak karuan, malah NU sendiri tidak sempat membuat tafsiran".⁴⁸

Masih menurut Kiai Sholeh, setidaknya ada tiga penafsiran tentang khittah. *Pertama*, khittah ala pengurus PKB yang menafsirkan bahwa NU tidak lagi terikat dengan parpol mana pun, tetapi warga NU diharapkan memperhatikan dan mendukung partai yang berdirinya difasilitasi oleh NU. *Kedua*, penafsiran khittah ala pengurus NU yang memandang bahwa makna khittah adalah warga NU bebas menyalurkan aspirasi politiknya. *Ketiga*, khittah ala kiai kultural NU, yang memaknai khittah sesuai yang telah digariskan pada muktamar. Dalam kesempatan lain, Kiai Sholeh juga mengatakan sebagai berikut:

"Sesungguhnya khittah NU (yang biasanya dijadikan dalil atau dalih) melarang mendukung atau berkampanye untuk salah satu calon, pengaturannya sederhana

⁴⁷ Wawancara, tanggal 28 Mei 2015

⁴⁸ Wawancara, tanggal 03 Juni 2015

saja, yaitu NU sebagai jam'iyah secara organisatoris tidak terikat dengan parpol ataupun ormas mana pun. Tidak terikat artinya independen, bebas, mandiri. Akan tetapi tidak terikat tidak harus diartikan takut dekat dengan sana dengan sini. Tidak terikat juga tidak harus diartikan dibiarkan tanpa arah".⁴⁹

Statemen Kiai Sholeh mengenai khittah ini mendapatkan pembenaran dari kiai lain, seperti yang dikatakan oleh Kiai Nawawi. KH Nawawi memaknai khittah sebagai satu seruan bagi warga NU untuk mendukung PKB.

"Khittah itu ada semasa Golkar, sehingga NU keluar dari PPP, sekarang karena NU tidak seperti dulu, maka yang namanya khittah yaitu warga NU harus kembali kepada PKB yang secara nyata dilahirkan oleh NU".⁵⁰

Menurut peneliti, maksud Kiai Nawawi di atas adalah, latar belakang lahirnya keputusan NU untuk kembali ke khittah merupakan suatu keputusan yang dilandasi kekecewaan terhadap PPP yang selalu merugikan NU. Di samping alasan tersebut, pada saat itu NU juga didesak oleh penguasa untuk tidak lagi ikut campur dalam urusan politik praktis, sehingga Kiai Nawawi seolah beranggapan Golkar-lah yang menjadikan NU kembali ke khittah karena Golkar.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Gus Suadi, Khittah dalam pandangannya merupakan "garis berfikir NU" baik secara personal maupun organisatoris. Dengan demikian khittah inilah yang membatasi hubungan NU dengan politik. Jika NU terus terjebak pada permainan politik praktis, maka akan kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu, oricntasi pergerakan NU perlu diluruskan ke jalan yang sesuai dengan tujuan awal berdirinya. Meskipun dengan keputusan seperti ini, NU bukan berarti bersikap apolitis, melainkan NU turut serta membangun insan berbudi luhur dan Islami.⁵¹

Oleh karena itu, para politisi NU haruslah menjaga amanat dan meningkatkan pelayanan kepada ummat dengan mencukupi kebutuhan sandang, papan, pangan serta pendidikan dan kesehatan maupun kebutuhan vital lainnya. Kalau kondisinya terbalik, maka tidak ada gunanya mereka memiliki jabatan politisi tersebut. Jadi, dalam pandangannya, jangan sampai terjadi, para politisi NU itu justru menjadi pekerja politik (*politic worker*) apalagi niat nyambut gawe.

⁴⁹ Wawancara, tanggal 12 Juni 2015

⁵⁰ Wawancara, tanggal 1 Juli 2015.

⁵¹ Wawancara, Tanggal 29 Juni 2015

Dalam pandangan Giddens, karena kebebasan seorang kiai sebagai agen yang mempunyai kapasitas untuk bertindak itulah, sehingga ia mampu bertindak akrobatik di tengah-tengah perselisihan pandangan politik antar kiai di NU. Hampir semua pandangan dan tindakan akrobatik kiai-kiai politik NU yang berbeda dan keluar dari aturan main Khittah NU sebagai organisasi, menjadikan *mashlahah 'ammah* menjadi alasan dan tujuan tindakan politik mereka. Mereka ingin membangun politik yang santun berdasarkan *ahlussunnah wal jama'ah*, dalam rangka ikut membangun *civil society* khususnya di Kabupaten Pasuruan. Bagi organisasi NU, tindakan-tindakan akrobatik para kiai itu masih dapat ditoleransi, apabila mereka masih bepegang teguh pada prinsip dasar etika politik NU yang selalu menjunjung tinggi prinsip kebangsaan dan kerakyatan. Semua itu telah ada aturan main yang jelas di dalam NU sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian institusi adalah hasil tindakan kolektif para agen atas berbagai pilihan strategis yang merupakan fungsi dari dialektika di antara struktur dan keagenan, dan di antara kendala dan peluang. Selain itu, kapasitas transformatif adalah sesuatu yang inheren dalam keagenan yang menyebabkan sebuah kemungkinan relatif tanpa batas akan potensi untuk menghasilkan tindakan. Dengan demikian, struktur bukan dan tidak pernah menjadi penentu (*predictor*) dari sebuah tindakan. Kompleksitas dualitas di antara kendala (*constraints*) dan peluang (*opportunities*)-dengan kata lain, di antara struktur dan keagenan-terletak pada kapasitas transformatif yang melekat pada agen yang akibat-akibatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Penelitian ini juga menyimpulkan, para Kiai Politik dalam Pilkada di lapangan mengoperasikan otonomi yang relatif besar dalam proses memahami politik. Sehingga kemudian memunculkan tindakan-tindakan akrobatik. Kapasitas untuk mengoperasikan dan mempertahankan sejumlah otonomi itu didasarkan oleh beberapa faktor yang saling memperkuat eksistensi otonomi itu: kewenangan yang diberikan oleh aturan organisasi tidak bersifat linear, dan seluruh kompleksitas dualitas di antara struktur dan keagenan.

Disamping aturan dan sumber-sumber, skema interpretatif memberikan dasar yang penting terhadap mana sebuah tindakan sosial para agen diorientasikan

pada tujuan yang relevan dalam kerangka makna yang khusus yang relevan dengan berbagai standar nilai dan pengetahuan yang berkembang dalam Organisasi NU. Dengan kata lain, skema interpretatif menyediakan sebuah landasan berikut parameternya yang dapat dipakai oleh agen sebagai dasar untuk melakukan penafsiran terhadap sebuah tindakan dan atau peristiwa secara bermakna dalam rangka menciptakan kemashlahatan umat (*Civil Society*).

Saran-Saran

Pertama: Bagi Kiai yang melibatkan diri dalam konstalasi politik, hendaklah lebih mementingkan kemashlahatan umat dari pada menjunjung tinggi kepentingan kelompok atau golongan dan juga egoisme pribadi.

Kedua: Bagi Pelaksana Pemilukada, sudah seharusnya melibatkan figur Kiai sebagai elit agama yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat sebagai katalisator yang saat meredam berbagai konflik yang terjadi dalam pemilukada.

D. DAFTAR PUSTAKA

-, 2002, "Analisis Wacana: Sebuah Pendekatan untuk Kajian Sosial Budaya, *Prasasti*, Jurnal Ilmu dan Seni Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, No. 45/ Tahun Xii/Mei 2002.
-, 1982b, 'Human Agency and Social Structure: A Critique of Giddens ; dalam *Anthony Giddens: Consensus and Controversy*, Ed. Clark,), Modgil, C., dan Modgil, J., Brighton: Falmer Press.
-, 1959a. "The Javanese Kiai: The Changing Role of Cultural Broker", dalam *Comparative Studies in Society and History*, (2): 250-256.
-, 1973. "Religion as a Cultural System", dalam *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Book.
-, 1979, *Central Problems in Social Theory*. London: Mac Milan.
-, 1984, *The Constitution of Society The Outline of The Theory of Structuration*. Cambrigde: Polity Press.
-, 1989, "A Reply to My Critics" dalam *Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and his Critics*, Ed. Held dan Thompson, Cambridge: Cambridge University Press.
-, 1991, *Modernity and Self-Identity*. Cambrigde: Polity Press.
-, 2002, *Thr Third Way The Renewali of social democracy*. Cambrigde: Polity Press.
-, 2004, *Sociology Fourth Edition*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

-,1959b. "The Javanese Village", dalam G William Skinner, (ed.). *Local Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia: A Symposium*. Yale University Cultural Report Series, Southeast Asian Studies.
- Abdullah, M. Amin., 1999. *Agama, Kebenaran, dan Relativitas (Sebuah Pengantar)*. Dalam Gregory Baum *Agama dalam Bayang-bayang Relativisme Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim tentang Sintesa Kebenaran Historis-Normatif*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Bekerjasama dengan Siprus.
- Almond, Gabrieldan B Gingham Powel, *Comperatif Politics; A Development Approach*, Boston:Little Brown, 1966. 78.
- Anwar Arifin, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Balai Pustaka,, 2003), 48.
- Archer, M.S, 1982a, 'Morphogenesis versus Structure and Action; *British Journal of Sociology*, Vol. 33 No.4.
- Arifin, Anwar. 2006. *Ilmu Komunikasi : sebuah pengantar ringkas*. Jakasrta. PT. Raja Grafindo Persada
- Astrid S, Susanto. *Komunikasi Sosial di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta, 1985, hal 34
- Avesson, M. and Skoldberg, K., 2000, *Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research*, London: Sage Publications.
- Bachruddin Ali Akhmad, *Momunikasi Politik*, Yogyakarta:Aswaja Presindo, 1999, 67
- Barnes, 2001, "Symbolic Interaction at the End of the Century", dalam Ritzer, G. and Smart, B., *Handbook of Social Theory*, London: Sage Publications.
- Beilharz, P., 2002, *Sosial Theory: A Guide to Central Thinkers*, Alih Bahasa Sigit Jatmiko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berger, P. And Luckmann., 1967, *The Social Construction of Reality*, Garden City, N.Y.: Doubleday.
- Bryant, C.G.A., and David, 1991, *Giddens' Theory of Structuration: A Critical Appreciation*. London: Routledge.
- Clifford Geertz, *The Javanese, Kiyahi the Change Riles of Cultural Broker, Comparative Studies in Social and Antroplogy*, (tt: tp 1960), 250-256
- Craib, I., 1992, *Anthony Giddens*, London: Routledge.
- Creswell, J.W., 1994, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, Jakarta: KIK Press Kalangan Sendiri.
- Dan D Nimmo, *Komunikasi Politik ; Khalayak dan Efek*. Bandung :Remaja Rosdakarya, 2006.
- Denzin, N.K., dan Lincoln., 2000, *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications.

*KOMUNIKASI POLITIK KIAI NU DALAM KONTESTASI PILKADA PERSPEKTIF TEORI
STRUKTURASI GIDDENS*

- Dessler, G., 1992, *Organization Theory: Integrating Structure and Behavior*. Singapore: Simon and Schuster (Asia) Pte. Ltd.
- Endang Turmudi, *Perselingkuhan kiai dan kekuasaan*, Yogyakarta : LKiS Yogyakarta., 2004.
- Giddens, A. 1984. *The Constitution of Society-Outline Of The Theory Of Structuration*, Polity Press.
- Giddens, A., 1977, *Studies in Social and Political Theory*. London: Hutchinson
- Greetz, C., 1961. *The Religion of Java*. Glencoe: The Free Press.
- Guba, E., 1990, "The Alternative Paradigm", dalam Guba, E., Ed., *The Paradigm Dialog*, Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Haralambos, M. Holborn, M., dan Heald, 2000, *Sociology: Themes and Perspectives*, Hammersmith: HarperCollins Publisher Ltd.
- Hefner, Robert W. 1987. "Islamizing Java?: Religion and Politics in Rural East Java", dalam *The Journal of Asian Studies*, 46 (3): 533-553.
- Hertz, R., Ed., 1996, "Introduction: Reflexivity and Voice", *Qualitative Sociology*, 19: 3-9.
- Hiroko Horikosi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 240
- Holton, R., 2001, "Symbolic Interaction at the End of the Century", dalam Ritzer, G. and Smart, B., *Handbook of Social Theory*, London: Sage publications.
- Horikoshi, Hiroko, 1976, " A Traditional Leader in a Time of Change: The Kiai and Ulama in West Java". *Disertasi Doktor*, University of Illinois.
- <https://gusdurian.net/cerita-seorang-pasukan-berani-mati-gus-dur-asal-pasuruan/> di akses tanggal 20 September 2022.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Insiden Alastlogo](https://id.wikipedia.org/wiki/Insiden_Alastlogo) , di akses tanggal 20 September 2022.
- <https://tirto.id/pembunuhan-dukun-santet-1998-sistematis-dan-terencana-dePk>, di akses tanggal 20 September 2022.
- Ismail SM. 2002. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wazis, Kun. 2015. *Strategi Politik Meraih Dukungan Massa Pondok Pesantren* (Jember: Jurnal Fenomena Vol. 14, No. 1, 2015), 164-165, diakses melalui <https://adoc.pub/strategi-politik-meraih-dukungan-massa-pondok-pesantren.html>
- Mansurnoor, 1990, *Islam in an Indonesian World, Ulam of Masura*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

*KOMUNIKASI POLITIK KIAI NU DALAM KONTESTASI PILKADA PERSPEKTIF TEORI
STRUKTURASI GIDDENS*

- Maxweel, Joseph A. 1996. *Qualitative Research Design an Interactive Approach*. California: Sage Publication.
- Miftah Faridl, *Peran Sosial Politik Kiai Di Indonesia*, Jurnal al Isthinbath, Volume XIX No. 2 April - Juni 2003 : 135 – 151
- Neuman. W.L., 1997, *Sosial Research Method: Qualitative and Quantitatif Approaches*. Boston: Allyn and Bacon.
- Newman, I., dan Benz, C. R., 1998, *Qualitatif-Quantitative Research Methodology: Exploring the Interactive Continuum*, Carbondale: Souther Illinois University Press.
- Pozzebon and Pinsonneault, *Challenges in Conducting Empirical Work Using Structuration Theory: Learning from IT. Research*. 2001: 206-207).
- Pozzebon and Pinsonneault, *Structuration Theory In The Is Field: An Assessment Of Research Strategies* Global Co-Operation in the New Millennium The 9th European Conference on Information Systems Bled, Slovenia, June 27-29, 2002: 206
- Retna Setya rahajoe, *Bentuk Komunikasi Politik Untuk Membangun Perilaku Politik Masyarakat Lokal Guna menciptakan Pemilukada Yang Aman*, JKMP, ISSN,2338-445X, Vol 1 No, 1, Maret 2013
- Rifa'i, Ahmad. 2005. Islam sebagai Kambing Hitam. Dalam *Media Indonesia* tanggal 02-04. Sila e-mel KV di vidya@tm.net.my.
- Ritzer, George, 2000, *Sociological Theory*, Singapore: McGraw-Hill Book. Companies House, Inc.
- Robertson, Roland, 1970, *The Sociological Interpretation of Religion*, New York: Schocken Books.
- Schlegel, Stuart S. 1977. *Grounded Research di dalam Ilmu-ilmu Sosial*. Aceh: PLPIIS.
- Schroeder, Ralph, 1992, *Max Weber and the Sociology of Culture*, London: Sage Publication
- Sparringa, Daniel, 1997, *Discaourse, Democracy an Intellectuals in New Order Indonesia: A Qualitative Sociological Study*, Australia: A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy of The Flinders University of South Australia.
- Suprayogo, Imam, 2007, *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai*, Malang: UIN Malang Press.
- Thompson, John B., 1984, Ideology and the Analysis of Discourse: A Critical Introduction to the Work of Michel Pecheux” dalam *Studies in The Theori of Ideology*. University of California Press, USA.
- Tischler, Henri L., 1990, *Introduction to Sociology*, Chicago: Holt, Rinehart and Winston.

*KOMUNIKASI POLITIK KIAI NU DALAM KONTESTASI PILKADA PERSPEKTIF TEORI
STRUKTURASI GIDDENS*

Turmudi, Endang , 2004, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LkiS.

Turner, Bryan S, 1998, *The Blackwell Companion to Social Theory*, Blackwell
Publisher, USA.